

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radars Semarang	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Kota Semarang

Halaman 9 dan 19

Dishub akan Ujicobakan di 37 Ruas Jalan

Parkir Berlangganan di Kota Semarang Tinggal Menunggu Persetujuan Polda

SEMARANG, TRIBUN

Berbagai persiapan penerapan sistem parkir berlangganan telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang. Sistem parkir yang telah diperbincangkan sejak tahun lalu ini digadang akan menjadi solusi kebocoran parkir dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak tepi jalan.

Kepala Dishub Kota Semarang, Endro P Martanto, mengatakan, sistem parkir

jadi solusi kebocoran parkir dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak tepi jalan.

Kepala Dishub Kota Semarang, Endro P Martanto, mengatakan, sistem parkir

STORY HIGHLIGHTS

- Dishub Kota Semarang akan mengujicobakan parkir berlangganan di 37 ruas jalan
- Setidaknya akan melibatkan sekitar 700 juru parkir (jukir) dalam uji coba itu
- Dishub mengklaim tidak akan mematikan juru parkir yang selama ini hidup dari penghasilan parkir

Dishub akan...

■ DARI HALAMAN 9

berlangganan ini melibatkan berbagai instansi di antaranya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng), Polrestaes Semarang, dan Polda Jateng.

Pihaknya pun telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak tersebut terkait penerapan sistem ini. Saat ini, Dishub Kota Semarang tengah menunggu persetujuan penerapan sistem parkir berlangganan dari Polda Jateng.

"Pemkot sudah mempersiapkan dan tinggal pelaksanaan. Ini melibatkan tidak hanya Pemkot Semarang, kami masih menunggu persetujuan dari Polda Jateng," terangnya, Rabu (19/6).

Endro melanjutkan, penerapan sistem ini akan dilakukan secara bertahap. Pada penerapan awal, Dishub akan melakukan uji coba di 37 ruas jalan dengan melibatkan sekitar 700 juru parkir (jukir). Jumlah jukir dimungkinkan akan bertambah mengingat belum semua ruas jalan belum masuk dalam daftar lokasi.

"Seperti di kawasan Universitas Negeri Semarang (Unnes), itu belum masuk, padahal potensi disana besar," ujarnya.

Jukir tersebut, sambung Endro, akan diakomodir sebagai petugas parkir yang telah dipersiapkan dan dibekali sosialisasi terkait penerapan sistem ini. Mereka juga akan diberi gaji sesuai upah minimum regional (UMR) Kota Semarang. Adapun anggaran untuk pemberian upah, Dishub tengah mempersiapkan sekitar Rp 30 miliar.

"Kami tidak serta merta

mematikan juru parkir yang selama ini hidup dari penghasilan parkir. Mereka akan digaji resmi serta mendapat jaminan BPJS," paparnya.

Menurut Endro, diterapkannya sistem parkir berlangganan, masyarakat Kota Semarang akan membayar retribusi lebih murah dibanding sistem yang saat ini sedang berjalan. Jika saat ini masyarakat memarkirkan kendaraannya lebih dari sekali dalam sehari, melalui sistem baru nanti masyarakat dihitung satu kali parkir dalam satu minggu.

Pembayaran parkir dilakukan saat masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat. Adapun besaran pembayaran senilai Rp 50 ribu untuk kendaraan roda dua dan Rp 100 ribu untuk kendaraan roda empat.

"Nanti masyarakat mendapatkan kartu parkir yang digunakan untuk parkir berlangganan," katanya.

Dia berharap, parkir berlangganan ini bisa segera disetujui dan diberlakukan agar pihaknya lebih mudah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap jukir. Di sisi lain, pihaknya akan lebih jelas membuat target penerimaan parkir sehingga PAD dari sektor parkir pinggir jalan bisa meningkat.

"Tapi sistem ini baru berlaku untuk kendaraan berplat nomor Kota Semarang saja sementara untuk plat luar kota kami regulasi tersendiri," jelas Endro.

Bagi kendaraan yang berplat luar kota, sambungnya, akan tetap membayar seperti biasa. Hanya saja, jukir

akan menggunakan aplikasi berbasis android yang bisa dipantau langsung setiap saat oleh Dishub. Sehingga, dana parkir akan tetap masuk ke kas daerah (kasda)

Lebih Efisien

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, mendorong Pemkot Semarang untuk menerapkan sistem tersebut jika memang kajian-kajian telah dilakukan secara mendalam.

"Rencana ini memang sudah lama karena harus ada kajian mendalam apakah layak atau tidak. Sistem ini juga tidak bisa berdiri sendiri harus menggandeng Samsat, sehingga memang harus dipersiapkan," jelasnya.

Menurut Supriyadi, sistem parkir berlangganan ini akan memutuskan mata rantai perpajakan yang saat ini cukup panjang mulai dari jukir, penguasa wilayah, pengepul, bendahara, hingga masuk ke Kasda. Sistem ini bisa mengefisienkan kebocoran yang mungkin terjadi lantaran panjangnya mata rantai tersebut.

"Kalau kami lihat mata rantai sekarang sangat panjang. Mata rantai ini harus dipotong," tandasnya.

Di sisi lain, lanjut Supriyadi, Pemkot harus mengantisipasi adanya penarikan parkir oleh jukir meskipun menerapkan sistem berlangganan. Sosialisasi kepada masyarakat harus digencarkan agar sistem ini dapat berjalan dengan baik.

"Selama ini kan baru wacana, belum ada sosialisasi. Jadi, harus mulai sosialisasi agar masyarakat tidak kaget, nanti tahu-tahu masyarakat bayar ke juru parkir, malah jadi doble bayarnya," ujarnya. (eyf)